

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara dibelahan dunia manapun. Bahkan kemiskinan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik ukur keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Dan bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010: 299) kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk

kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (W ijayanti, 2005: 215 – 225).



Gambar 1.1

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase penduduk miskin pada Tahun 2019 sebesar 9,41 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka kemiskinan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9,82 persen. Data ini menunjukkan perkembangan yang positif. Pasalnya, ketika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin malah berhasil diturunkan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 sebesar 25,14 juta jiwa, menurun 0,80 juta orang terhadap Tahun 2018 yang menunjukkan angka sebesar 25,95 juta jiwa. Garis Kemiskinan pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Tahun 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per

rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan. (BPS 2019).

Pada awal Maret 2020, Indonesia menjadi bagian dari 69 negara yang terjangkit virus corona setelah terkonfirmasi dua orang positif menderita Covid-19 (Fadli, 2020). Jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 meningkat drastis menjadi 117 orang pada pertengahan Maret 2020. Pada waktu yang sama, kondisi global menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 153.517 kasus terkonfirmasi dengan tingkat kematian sebesar 5.735 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Akibat masifnya tingkat penularan virus corona ini, pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi dampak Covid-19 pada berbagai sektor. Selain sektor kesehatan, sektor sosial dan ekonomi masyarakat mengalami dampak nyata dari Covid-19. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan barang-barang kebutuhan, disorganisasi dan disfungsi sosial, tingginya tindak kriminal, serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran mulai terjadi pada awal penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian. Rumah tangga Indonesia yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. Akibat menurunnya pendapatan, pengeluaran konsumsi

masyarakatpun menurun karena penurunan daya beli. Sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah sangat memengaruhi pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal biasanya mendapatkan upah atau pendapatan harian, namun karena menurunnya kegiatan ekonomi sulit bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, banyak karyawan yang di PHK karena perusahaan menghentikan usahanya. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat karena penduduk rentan miskin dan hampir miskin kebanyakan bekerja pada sektor informal dan kini statusnya menjadi miskin.

Berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang tidak lagi bekerja akibat pandemi Covid-19 hingga akhir Mei 2020 sebanyak 1,7 juta orang. Jumlah data pekerja yang terdampak pandemi terbagi dalam beberapa kriteria. Yakni, pekerja formal yang di PHK sebanyak 375.165 pekerja, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.032.960 pekerja, ditambah lagi pekerja informal yang terdampak corona yang sebanyak 314.833 orang. Sehingga total ada 1.722.958 orang yang terdata tidak lagi bekerja lantaran pandemi Covid-19.

Jawa Barat adalah salah satu Provinsi yang terkena dampak dari Covid-19 dan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020, setelah beberapa tahun sebelumnya menunjukkan tren penurunan. Angka tersebut menjadikan Jawa Barat berada pada posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin

terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur dengan 4,42 juta jiwa (11,09 persen) dan Jawa Tengah sebanyak 3,98 juta jiwa.

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Diantara 27 Kabupaten/Kota, Kabupaten Ciamis menjadi objek penelitian dalam karya tulis ini. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat- Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah. Dapat dikatakan Ciamis memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Akan tetapi Ciamis memiliki kompleksitas kemiskinan yang cukup tinggi. Selain itu, akibat pandemi covid-19 berbagai wilayah mengalami peningkatan angka kemiskinan karena meningkatnya pengangguran dan masyarakat rentan miskin menjadi miskin, tak terkecuali Kabupaten Ciamis.

Jika berbicara tentang kemiskinan tentu akan berbicara mengenai pembangunan, mengingat *term* ini adalah dua sumbu yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus-menerus untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan Indonesia berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembangunan Nasional negara Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di negara tersebut dan konsumsi adalah salah satu penunjangnya. Indonesia merupakan salah satu negara dimana konsumsi

memiliki peran dominan dalam perekonomian karena memberikan kontribusi yang besar yaitu sampai dengan 50% dari PDB (BPS, 2019).

Konsumsi merupakan suatu bentuk dari perilaku ekonomi yang menjadi hak asasi setiap manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang di alami, di dalam kehidupan sehari-hari konsumsi diartikan dengan pemenuhan kebutuhan akan makan dan minum. Sedangkan di dalam ilmu ekonomi konsumsi memiliki arti semua perilaku seseorang yang memanfaatkan dan menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi perilaku konsumsi tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan akan makanan dan minuman saja , tetapi juga perilaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli kendaraan dan membeli fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi non makanan, begitupun sebaliknya. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan makanan. Oleh karena itu motif konsumsi atau pola konsumsi suatu kelompok masyarakat sangat ditentukan pada pendapatan. Atau secara umum dapat dikatakan tingkat pendapatan yang berbeda-beda menyebabkan keanekaragaman taraf konsumsi suatu masyarakat atau individu.

Sebagai pelaku ekonomi, manusia pastinya akan melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada ekonomi makro, konsumsi menjadi suatu elemen pada fungsi pendapatan nasional yaitu selain investasi dan pengeluaran pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi berperan penting dalam perekonomian negara. Konsumsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konsumsi terhadap makanan dan konsumsi non Makanan. Besaran konsumsi yang dilakukan setiap individu ataupun rumah tangga tentunya sangatlah beragam, karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Menurut Hartati dkk. (2008) dalam Hukum Engel menyatakan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. Sebaliknya, rumah tangga yang berpendapatan tinggi akan membelanjakan sebagian kecil saja dari total pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Dapat dikatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi masyarakat. Berikut data yang menggambarkan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita Rumah Tangga berdasarkan penggolongan pengeluarannya.

Tabel 1.1
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Barang dan
Golongan Pengeluaran 2019 (Rupiah/Bulan)

Golongan Pengeluaran	Pedesaan		Perkotaan	
	Makanan	Non Makanan	Makanan	Non Makanan
< 150.000	93.166	46.182	-	-
150.000 - 199.999	123.799	60.305	118 860	63 194
200.000 - 299.999	177.851	89.950	178 263	94 328
300.000 - 499.999	265.487	139.839	268 846	143 236
500.000 - 749.999	385.526	232.969	384 432	239 025
750.000 - 999.999	518.694	348.722	501 567	366 217
1.000.000 - 1.499.999	677.268	538.454	653 393	570 830
>1.500.000	935.475	1.250.198	1 012 745	1 652 144
Rata – rata per Kapita	490.754	392.075	637.132	751.080

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan antara pengeluaran konsumsi di daerah perkotaan dan pedesaan. Dimana pada daerah perkotaan pengeluaran konsumsi rumah tangga lebih banyak dialokasikan untuk konsumsi non pangan, yaitu sebesar Rp 751.080,- dan pengeluaran konsumsi untuk pangan sebesar Rp 637.132,-. Untuk pengeluaran konsumsi di pedesaan sebaliknya, rumah tangga lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi pangan yaitu sebesar Rp. 490.754,- dan konsumsi non pangan sebesar Rp 392.075,-. Sesuai dengan hukum *Engel* yang menyatakan bahwa "semakin kecil pendapatan seseorang, semakin besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi pangan. Sebaliknya, semakin besar pendapatan seseorang, semakin kecil bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi pangan".

Pola konsumsi yang didominasi pada pengeluaran pangan merupakan potret masyarakat dengan kesejahteraan yang masih rendah. Sebaliknya pola konsumsi

yang didominasi pada pengeluaran non pangan merupakan gambaran dari rumah tangga yang lebih sejahtera. Hal ini disebabkan rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah hanya dapat fokus memenuhi kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup rumah tangga sehingga pola konsumsi tampak dominan pada konsumsi pangan. Sedangkan rumah tangga yang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dapat memenuhi baik kebutuhan pangan maupun non pangan.

Kemudian hubungan konsumsi dengan pendapatan dijelaskan dalam teori Keynes yang menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh *disposable income* saat ini. Dimana *disposable income* atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jika pendapatan *disposable* tinggi maka konsumsi juga naik. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan *disposable*. Selanjutnya menurut Keynes ada batas konsumsi minimal, tidak tergantung pada tingkat pendapatan yang disebut konsumsi otonom. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan = nol. Hal ini ditentukan oleh faktor di luar pendapatan, seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit, standar hidup yang diharapkan, distribusi umur, lokasi geografis (Nanga, 2001:31).

Secara garis besar alokasi penggunaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan yaitu pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran untuk non pangan. Di negara berkembang, salah satunya Indonesia, pengeluaran untuk pangan masih menjadi bagian terbesar dari total

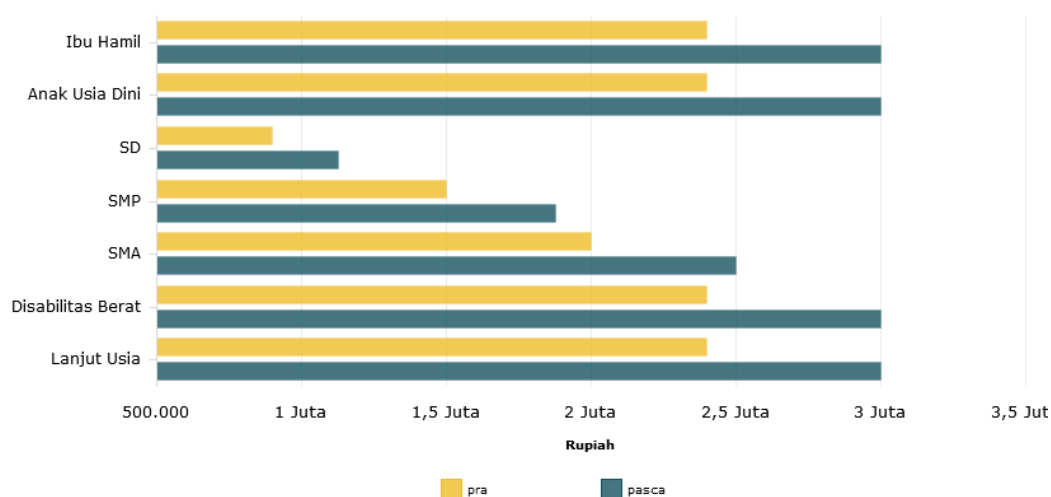
pengeluaran rumah tangga. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh. Bagi rumah tangga miskin memiliki pendapatan secara umum tidak menentu, dalam artian pendapatan yang diperoleh tidak dapat diperkirakan setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan jenis pekerjaan yang dijalankan tidak memberikan pendapatan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, kemudian tidak adanya pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan tetap. Sehingga pada akhirnya berdampak pada pola pengeluaran konsumsinya. Pengeluaran konsumsi pangan tidak terpenuhi dengan baik, dan pengeluaran konsumsi non pangan sulit untuk dipenuhi.

Berbagai skema bantuan telah diluncurkan Pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dana triliunan rupiah dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Selain itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Bantuan yang diluncurkan pemerintah selama pandemi berupa perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan BLT Usaha Mikro Kecil

Penulis memfokuskan objek penelitian pada Rumah Tangga Miskin penerima subsidi PKH atau Program Keluarga Harapan, yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan

penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan sudah diluncurkan sejak tahun 2007 sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Pada Tahun 2020, saat terjadi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan perluasan terhadap keluarga penerima manfaat PKH, guna membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pemerintah berencana menggandakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan pada kuartal II tahun ini. Hal ini bertujuan meredam dampak pandemi corona terhadap perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, peningkatan bantuan PKH rencananya diberikan pada April hingga Juni.



Gambar 1.2

Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kelompok Penerima

Sumber: Kementerian Sosial, 2020.

Tiap komponen bantuan PKH akan bertambah 25%. Kebijakan ini berlaku mulai April 2020 dan akan diberikan selama sembilan bulan. Jumlah penerima bantuan juga ditingkatkan, dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan PKH ini maksimal diberikan pada empat jiwa di tiap keluarga.

Ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia akan menerima masing-masing Rp 3 juta. Anak yang duduk di sekolah dasar (SD) akan mendapat Rp 1,125 juta. Siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) masing-masing akan mendapat Rp 1,875 juta dan Rp 2,5 juta.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan survei di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebagai representasi kelompok masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Panumbangan. Desa Sindangherang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.882 jiwa dengan jumlah penerima Bantuan PKH terbanyak di Kecamatan Panumbangan. Sebanyak 1006 Rumah tangga di Desa Sindangherang yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hal tersebut menggambarkan ketidak mampuan 1.006 Rumah Tangga di Desa Sindangherang untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya baik itu Konsumsi Makanan maupun Konsumsi Non Makanan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk memberikan bantuan. Maka penulis ingin mengetahui pengaruh pendapatan terhadap alokasi konsumsi Rumah Tangga Miskin sebelum dan sesudah adanya pandemic Covid-19.

Berdasarkan pada berbagai penjelasan dan fenomena sebelumnya, tampak bahwa ekonomi rumah tangga merupakan sektor yang rawan mengalami goncangan

ekonomi akibat adanya wabah Covid-19. Dengan adanya efek tersebut, sudah sepatutnya pelaku ekonomi rumah tangga menanggapi permasalahan ini dengan bijak supaya dapat bertahan dalam keuangan di era wabah Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh pendapatan yang merupakan faktor dominan yang menyebabkan perubahan pengeluaran konsumsi masyarakat. Pada beberapa penelitian terdahulu telah teruji bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Konsusi Rumah Tangga Miskin, maka penulis tertarik menguji kembali dengan lokasi penelitian yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti serta memilih judul **“Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Miskin Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis (Studi Komparasi Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi non makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum masa Pandemi Covid-19?

3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi total rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada masa Pandemi Covid-19?
5. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi non makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada masa Pandemi Covid-19?
6. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi total rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada masa Pandemi Covid-19?
7. Bagaimana perubahan hasrat berkonsumsi makanan, non makanan dan konsumsi total rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum masa Pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi non makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi total rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum Pandemi Covid-19?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada masa Pandemi Covid-19.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi non makanan rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada masa Pandemi Covid-19.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi total rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada masa Pandemi Covid-19?
7. Untuk mengetahui bagaimana perubahan hasrat berkonsumsi makanan, non makanan dan konsumsi total rumah tangga miskin di Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebelum dan pada masa Pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui

alokasi pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin sebelum masa pandemi covid-19 dan pada masa pandemi covid-19.

2. Bagi responden, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan berupa informasi tentang alokasi konsumsi masing-masing responden pada masa pandemi covid-19. Sehingga nantinya pelaku ekonomi rumah tangga menanggapi permasalahan ini dengan bijak supaya dapat bertahan dalam keuangan di era pandemi covid-19.
3. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan terutama dalam rangka mengevaluasi kebijakan dan menyusun perencanaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi pihak lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data primer yaitu perolehan data dari wawancara, survei dan observasi pada rumah tangga miskin.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021, dengan perkiraan antara bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

Keterangan	Bulan/Tahun 2020-2021																															
	Nov				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																														
Pengumpulan Data			■	■																												
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian					■	■	■	■	■																							
Seminar Usulan Penelitian									■																							
Penelitian Lapangan									■	■	■	■	■	■	■	■																
Surey Awal																	■	■	■	■	■	■	■	■								
Analisis Data																					■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																					■	■	■	■	■	■	■	■				
Ujian Skripsi dan Komprehensif																													■	■	■	■